



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KENDAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI PARYANI SULISTYOWATI
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM
3. NHK : 452959

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/120 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 211.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, HONDA CB150 R Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 48.564.358

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 889.564.358

III. HUTANG Rp. 112.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 777.064.358

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.